

**DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta)



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Silta Aglisnema

No. Mahasiswa : 15312129

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Naama : Silta Aglisnema

No.Mahasiswa : 15312129

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku “

Yogyakarta, 13 Maret 2019

Penulis,



(Silta Aglisnema)

**DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Silta Aglisnema

No.Mahasiswa : 15312129

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 - Maret - 2019

Dosen Pembimbing,



Isti Rahayu,Dra.,M.Si., Ak.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disusun Oleh : **SILTA AGLISNEMA**

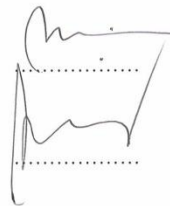
Nomor Mahasiswa : **15312129**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 8 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak, Cert, SAP

Penguji : Abriyani Puspaningsih, Dra., Ak., M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, puji syukur selalu penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga ;penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis junjungankan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat-Nya kepada umat islam hingga saat ini.

Skripsi dengan judul “Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta)” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik hingga akhir. Terimakasih atas segala nikmat serta rahmat yang telah diberikan hingga detik ini, semoga penulis selalu berada dalam lindungan-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan penulis dalam menjalani kehidupan serta mengajarkan penulis untuk selalu sabar dan semangat dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani hidup.
3. Kedua orang tua, Bapak Imam Santoso dan Ibu Neneng Sunita yang selalu memberikan dukungan, nasihat serta doanya kepada penulis sehingga dapat menjadikan penulis menjadi pribadi yang selalu ingin menjadi lebih baik. Terimakasih atas segalanya dan semoga penulis dapat segera membahagiakan dan membanggakan Bapak dan Ibu.
4. Haska Dhatunema adik penulis satu-satunya, terimakasih atas segala hal-hal menyenangkan serta menjengkelkan yang telah kau buat selama ini, semoga saudara perempuanmu ini bisa memberikan apa yang kau mau.
5. Eyang putri dan eyang kakung terimakasih atas segala doanya, nasihat dan dukungannya selama ini.
6. Bapak Jaka Sriyana SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan nasihat serta bimbingannya selama 6 bulan ini. Terimakasih banyak Bu Isti atas waktu, nasihat, serta saran yang telah diberikan. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah SWT.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi UII jurusan Akuntansi atas ilmu, nasihat serta pengalaman yang telah diberikan dari semester awal hingga semester akhir.
10. Sahabat-sahabat kuliah penulis “RV Soon To Be/Rumpi No Secret” yang terdiri dari Apriliyana Wardani, Shofi Yasmina Ruhin, Raizar Rahmi Revindaliza, serta Annisa Nur Fauziyah. Terimakasih sudah menjadi teman kuliah, teman main, dan teman bahagiaku selama 3 tahun terakhir ini. Semoga kita semua selalu diberi ridho Allah SWT.
11. Sahabat rantau penulis yang terdiri dari Apriliyana Wardani dan Faulia Ade Suryani, terimakasih atas segala waktu, pengalaman, canda, tawanya. Kalian teman yang selalu ada dimanapun dan disaat apapun, terimakasih atas segala support dan doanya semoga kita semua selalu diberi ridho Allah SWT.
12. Kakak Perempuan satu-satunya Diana Apriliya, terimakasih sudah mau jadi kakak, sahabat, dan pendengar setia semua keluh kesahku, terimakasih atas semua nasihat dan traktirannya semoga Allah SWT selalu memberi yang terbaik.
13. Teman-teman sekaligus inspirator penulis yang tidak perlu disebutkan namanya, terimakasih sudah menemani dan membuat hidup ini menjadi lebih berwarna selama 1,5 tahun terakhir. Terimakasih sudah mengajari, serta memberi motivasi jarak jauh, terimakasih atas segala inspirasi yang telah diberikan sehingga dapat mengingatkan penulis bahwa setiap orang mampu meraih mimpinya masing-masing di saat dan di waktu yang tepat,

just be and believe on yourself you are the one who made it so you must acieved it.

14. Teman Kos satu-satunya yang kukenal Aghannisa Kartika, terimakasih sudah jadi teman sehari-hari, teman makan, teman masak bareng, teman sharing. Semoga kita semua selalu diberi ridho Allah SWT.
15. Fauzia Aulia dan Anydia Fairuz Putri sahabat seleksi alam sejak SD-SMA, terimakasih sudah menjadi sahabat penulis selama ini, semoga kita selalu diberi kebahagiaan serta selalu di ridhoi Allah SWT.
16. Teman-teman semuanya yang sudah membantu proses penyusunan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DIY yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk dapat mengisi kuesioner penelitian ini, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dna Ibu semuanya.

Semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 24 Maret 2019

Penulis,

Silta Aglisnema

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Tugas Akhir Skripsi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah :.....	4
1.3 Tujuan Penelitian :	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel	7
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	7
2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (<i>Goal Setting Theory</i>)	8
2.1.3 Good Governance	8
2.1.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.....	9
2.1.5 Anggaran	11
2.1.6 Kejelasan Sasaran Anggaran	12
2.1.7 Partisipasi Penyusunan Anggaran	13
2.1.8 Komitmen Organisasi.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Hipotesis Penelitian	19
2.3.1 Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah	19

2.3.2	Partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah	20
2.3.3	Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan komitmen organisasi.....	21
2.3.4	Partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan komitmen organisasi.....	23
2.4	Model Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1	Populasi dan Penentuan Sampel	26
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.3	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	27
3.3.1	Kejelasan Sasaran Anggaran	27
3.3.2	Partisipasi Penyusunan Anggaran.....	27
3.3.3	Komitmen Organisasi.....	28
3.3.4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	29
3.4	Metode Analisis Data.....	29
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	30
3.4.2	Uji Kualitas Data.....	30
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.4.4	Uji Hipotesis	32
3.5	Hipotesis Operasional	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	35
4.2	Karakteristik Responden	36
4.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	39
4.4	Uji Kualitas Data	40
4.4.1	Uji Validitas.....	40
4.4.2	Uji Reliabilitas	42
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	43
4.5.1	Uji Multikolinearitas	43
4.5.2	Uji Normalitas	44
4.5.3	Uji Heterokedastisitas	45
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda	46

4.6.1	Persamaan 1	46
4.6.2	Persamaan 2	47
4.6.3	Persamaan 3	48
4.7	Uji Hipotesis	49
4.7.1	Hipotesis 1	49
4.7.2	Hipotesis 2	50
4.7.3	Hipotesis 3	50
4.7.4	Hipotesis 4	51
BAB V PENUTUP		53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Keterbatasan dan Saran	54
5.3	Implikasi Penelitian	54
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		59

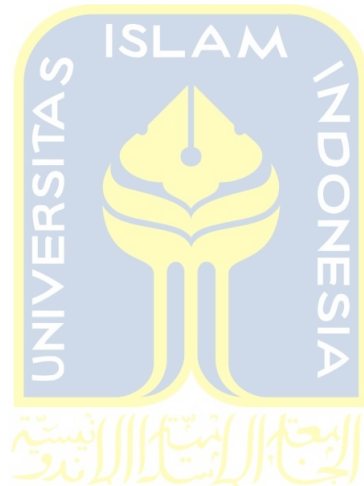


DAFTAR TABEL

1.1 Hasil Evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota dan Provinsi Wilayah III Tahun 2017.....	2
2.1 Kategori Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11
2.2 Penelitian Terdahulu	15
4.1 Hasil Pengumpulan Kuesioner	35
4.2 Gender	36
4.3 Umur	37
4.4 Jabatan	37
4.5 Lama Menjabat	38
4.6 Pendidikan Terakhir	39
4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.8 Hasil Uji Validitas.....	41
4.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	43
4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	44
4.11 Hasil Uji Normalitas	45
4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 1	46
4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2	47
4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 3	48

DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Penelitian 1	24
2.2 Model Peneltian 2	24
2.3 Model Penelitian 3	25
4.1 Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian	60
Lampiran 2 : Data Responden	65
Lampiran 3 : Jawaban Kuesioner	66
Lampiran 4 : Karakteristik Responden	74
Lampiran 5 : Uji Statistik Deskriptif	77
Lampiran 6 : Uji Validitas Data	78
Lampiran 7 : Uji Reliabilitas Data	82
Lampiran 8 : Uji Normalitas Data	83
Lampiran 9 : Uji Multikolineritas Data	84
Lampiran 10 : Uji Heterokedastisitas	85
Lampiran 11 : Uji Regresi Linier Berganda	86
Lampiran 12 : Surat Rekomendasi Penelitian	87



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of budget target clarity and budgeting participation on the performance accountability of government agencies with organizational commitment as a moderating variable. The sampling technique used purposive sampling technique. Data was collected through a questionnaire that is distributed directly to employees in the Regional Work Unit (SKPD) of the Special Province of Yogyakarta. This study used multiple regression analysis. The results of this study indicate that (1) budgetary clarity has a positive influence on the performance accountability of government agencies, (2) budgeting participation has a positive influence on the performance accountability of government agencies, (3) organizational commitment does not strengthen the relationship between clarity of budget goals with budgetary participation, (4) organizational commitment does not strengthen the relationship between clarity of budget targets and budgetary participation.

Key Word : *budget target clarity, budgeting participation, organizational commitment, performance accountability of government.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan langsung kepada karyawan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (3) komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan partisipasi penyusunan anggaran, (4) komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan partisipasi penyusunan anggaran.

Kata Kunci : *kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kerja atas semua pekerjaan yang telah ditugaskan. Menurut Mardiasmo (2005) akuntabilitas publik adalah sebuah kewajiban suatu agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan kepada seorang principal yang memiliki hak untuk mengetahuinya. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dapat diketahui bahwa akuntabilitas merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja, akuntabilitas merupakan cara pemerintah dalam merealisasikan tanggung jawab terhadap masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui hasil kinerja pemerintahnya selama satu periode. Adapun karakteristik *Good Governance* antara lain yaitu partisipasi dan akuntabilitas. Kedua karakteristik ini dapat menjadi alat untuk membantu pelaksanaan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Menurut hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2017 di wilayah III yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, mendapatkan kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya. Dari beberapa daerah

tersebut dapat terlihat, ada pemerintah daerah yang mendapatkan skor A, BB, dan B, dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 1.1

Hasil Evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota dan Provinsi Wilayah III Tahun 2017

SKOR	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
AA	-	-
A	-	1
BB	7	1
B	25	8
CC	71	2
C	57	-
D	3	-

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dari daftar hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah wilayah III dapat diketahui bahwa hanya terdapat 1 pemerintah daerah tingkat provinsi yang mendapatkan skor A yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi masih banyak Pemerintah daerah lainnya yang masih mendapatkan skor dibawah rata-rata, bahkan masih ada yang belum melaporkan hasil kinerjanya. Syarat untuk mendapatkan skor tinggi dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu mempergunakan anggaran yang sudah dibuat sesuai dengan rencana kerja yang akan dicapai, sehingga menghindari dari pemborosan dan mencapai hasil kerja yang diinginkan.

Berdasarkan instruksi Presiden, menyatakan bahwa seharusnya instansi pemerintah mulai untuk mewujudkan penggunaan anggaran negara secara lebih efisien dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat, dengan begitu pemerintah sama

saja dengan mewujudkan birokrasi yang efisien. Akuntabilitas dapat berjalan jika pemerintahan hanya berorientasi pada hasil kerja yang akan dicapai dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP.

Penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kaltsum dan Roman (2013), Fauzan (2017), Setyawan (2017), dan Asrini (2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif atau signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sedangkan menurut Herawaty (2011), serta Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Arifin W (2012) dan Asrini (2017), menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Anwar (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai moderasi, sedangkan menurut Arifin W (2012) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai moderasi.

Penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai moderasi yang dilakukan oleh Arifin W (2012) dan Kusuma (2016) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh negatif. Sedangkan menurut Duvamindra (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kedua variabel dengan komitmen organisasi sebagai moderasi.

Oleh karena itu penelitian ini melakukan penelitian kembali dengan mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kaltsum dan Roman (2013), dengan pembeda yaitu menggunakan dua variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel moderasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

1.2 Rumusan Masalah :

- 1) Apakah terdapat pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIY?
- 2) Apakah terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah DIY?
- 3) Apakah terdapat pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIY melalui Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi?

- 4) Apakah terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIY melalui Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh langsung antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIY
- 2) Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh langsung antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIY
- 3) Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Komitmen Organisasi sebagai moderasi antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIY
- 4) Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Komitmen Organisasi sebagai moderasi antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIY

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat juga dijadikan sebagai tambahan, pedoman, dan tolak ukur bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai populasi dan penentuan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, metode analisis data, dan hipotesis operasional.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil pengujian atas hipotesis disertai pembahasan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agensi Teori adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dengan pengelolanya.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya memiliki kesamaan konsep dengan teori agensi. Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah kewajiban pihak pemegang amanah/agen untuk dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah/principal yang memiliki hak dan kewenangan untuk diberi pertanggungjawaban. Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas yang diinginkan, salah satu caranya yaitu dengan sasaran yang jelas dalam perencanaan anggaran serta adanya partisipasi penyusunan oleh pihak-pihak yang terkait agar dapat menghasilkan anggaran yang dapat mudah untuk dilaksanakan sehingga akan menghasilkan hasil kinerja yang diinginkan oleh seluruh pihak, terutama dalam hal mensejahterakan masyarakat.

2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

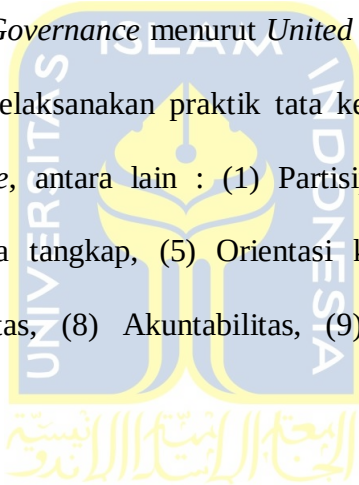
Teori penetapan tujuan memiliki asumsi bahwa suatu sasaran yang akan dicapai seperti ide di masa depan ataupun keadaan yang diinginkan dapat memainkan peran penting sebelum bertindak (Narsih, 2016). Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja karyawannya. Menurut Marani (2002) dalam Anwar (2018) mengemukakan bahwa seseorang yang memahami tujuan atau memahami apa yang diharapkan organisasi kepadanya maka akan berpengaruh pada perilaku kerjanya.

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah perwujudan/tujuan dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat atas kerja yang telah dilakukan. Maka dari itu, dengan menggunakan komitmen organisasi yang menjadi dasar seorang karyawan untuk bertindak dalam organisasi, dapat terlihat seberapa besar niat dan motivasi seorang karyawan dalam pekerjaannya untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Melalui kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penysusunan anggaran dapat diketahui seberapa jauh pemahaman karyawan terhadap tujuan organisasi sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerjanya.

2.1.3 Good Governance

Good Governance secara umum dapat diartikan sebagai cara-cara mengelola urusan publik (Mardiasmo, 2005:17). *Good Governance* atau Tata pemerintahan yang baik merupakan sebuah istilah yang telah menjadi bagian yang mengikat di berbagai lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Secara

umum, jika bekerja didalam lingkup pemerintahan atau organisasi publik pasti menjunjung tinggi mengenai tata pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, reformasi peraturan, dan keterampilan sektor publik dan kepemimpinan. Didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 juga menjelaskan pengertian pemerintahan yang baik (*Good Governance*)), yaitu : pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Selain itu karakteristik *Good Governance* menurut *United Nation Development Program* yang berguna untuk melaksanakan praktik tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, antara lain : (1) Partisipasi, (2) Aturan hukum, (3) Transparansi, (4) Daya tangkap, (5) Orientasi konsensus, (6) Keadilan, (7) Efisiensi dan efektivitas, (8) Akuntabilitas, (9) Visi Strategi (Mardiasmo, 2005:18).



2.1.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah perwujudan atas kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja terhadap pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan kepada masyarakat melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematis atas aktivitas-aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan evaluasi yang dibuat pemerintah daerah biasa disebut dengan LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Isi laporan kerja atau informasi yang terdapat didalamnya berupa laporan keuangan yang harus dapat menunjukkan informasi mengenai kinerja dan tentunya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan. Menurut Santoso (2008) dalam Pratiwi dan Setyowati (2017) mengatakan bahwa untuk dapat mencapai tujuan laporan akuntabilitas yang baik, yang perlu diperhatikan yaitu penetapan ukuran-ukuran yang dapat di gunakan seperti, nilai ekonomis, efisiensi laporan keuangan, dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya sehingga dapat terlihat secara outcome yang dihasilkan.

LAKIP terdapat 4 bagian penting yang nantinya akan dinilai dan menentukan apakah pemerintah daerah tersebut mendapatkan akuntabilitas yang baik atau buruk. Hal pertama yang diperhatikan yaitu perencanaan strategik, bagian ini merupakan bagian yang harus dilakukan dan termasuk langkah awal bagi pemerintah daerah, seperti pembuatan sasaran dan strategi kerja. Kedua yaitu perencanaan kinerja yang merupakan penjabaran lebih detail dari apa yang dilakukan pada tahap perencanaan strategik dengan membuat program kerja tahunan dan capaian yang akan dicapai selama satu periode. Ketiga, pengukuran kinerja dari apa yang sudah dilaksanakan dengan cara membandingkan antara rencana dengan capaiannya. Terakhir yaitu evaluasi kinerja, dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui capain kerja apakah memiliki kemajuan atau

kemunduran, apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, yang nantinya berfungsi untuk pelaksanaan program periode selanjutnya.

Berikut adalah kategori nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

Tabel 2.1.
Kategori Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2.1.5 Anggaran

Anggaran adalah sebuah pernyataan estimasi kerja yang akan dicapai selama satu periode kerja, sedangkan penganggaran adalah langkah selanjutnya dalam mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2005:61). Anggaran merupakan hasil dari perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat, sedangkan penganggaran juga merupakan tahapan yang penting, karena tahap ini harus dilakukan sesuai dan berorientasi pada kinerja yang akan dilaksanakan. Aspek-aspek yang ada dalam anggaran sektor publik antara lain yaitu: (1) Aspek perencanaan, (2) Aspek pengendalian, (3) Aspek akuntabilitas

publik, (Mardiasmo, 2005:61). Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua yaitu APBN dan APBD yang dimana menggambarkan mengenai rencana keuangan di masa yang akan datang. Menurut Mardiasmo (2005:63) menyatakan bahwa terdapat 3 hal mengapa anggaran sektor publik penting, antara lain :

- a. Anggaran merupakan alat untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran sangat diperlukan karena kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas jumlahnya.
- c. Anggaran sangat diperlukan guna meyakinkan pemerintah telah bertanggung jawab atas rakyatnya.

2.1.6 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Efrizal (2017) menyatakan bahwa salah satu karakteristik anggaran yaitu adanya kejelasan sasaran anggaran, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka lebih memudahkan dalam menyusun target-target anggarannya. Sedangkan menurut Fauzan (2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan bagaimana tujuan anggaran dibuat dan ditetapkan secara jelas dan spesifik supaya anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas pemerintah daerah harus membuat perencanaan anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai sehingga dalam pelaksanaannya dapat mudah dimengerti dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta dapat

menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Fauzan (2017) menyatakan bahwa wujud penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

2.1.7 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran memiliki dua jenis pendekatan antara lain yaitu *bottom-up* dan *top-down*. Dari kedua pendekatan tersebut menurut Anthony dan Govindarajan (2005:87) menyatakan bahwa pendekatan *bottom-up* lebih sering digunakan, karena dengan pendekatan ini memungkinkan untuk menciptakan komitmen yang lebih demi mencapai tujuan. Pendekatan *bottom-up* adalah pendekatan dimana manajer ditingkat yang lebih rendah dapat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran (Anthony dan Govindarajan, 2005:86).

Menurut Biduri (2011) menyatakan bahwa partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran lebih mengarah pada bagaimana tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran kota serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Sedangkan menurut Intihanah dan Muthia.S (2017) partisipasi anggaran sektor publik menunjukkan bagaimana partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh pusat pertanggungjawaban anggaran mereka.

Partisipasi anggaran secara terperinci terdiri atas 3 indikator penilaian, antara lain yaitu, keterlibatan, pengaruh, dan kontribusi para karyawannya.

Keikutsertaan aparat pemerintah dalam penyusunan anggaran dapat mensukseskan pencapaian target kerja yang diinginkan. Tidak hanya dari pihak atasan/manajer tingkat atas saja yang dapat memberikan pendapatnya tetapi manajer/staf bawahan juga perlu didengarkan pendapatnya, dengan begitu dapat meningkatkan motivasi bagi keduanya serta tanggungjawab yang sama dalam mencapai target anggaran (Ibrahim, 2015).

2.1.8 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah tingkat sejauh mana seorang karyawan dapat memihak pada sebuah organisasi beserta tujuannya, dan ingin mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Lubis, 2017:83). Sedangkan menurut Anwar (2018) komitmen organisasi adalah suatu dorongan yang datang dari individu untuk melakukan sesuatu demi menunjang keberhasilan organisasi serta lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Hal ini dapat timbul dikarenakan seorang individu memiliki sebuah ikatan emosional terhadap organisasi yang mereka tempati. Keyakinan dan dorongan itu dapat berupa dukungan moral, dapat menerima ruang lingkup organisasi, serta keinginan dari diri sendiri untuk mengabdikan kepada organisasi. Adapun karakteristik komitmen organisasi antara lain yaitu, keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi, kemampuan sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi, dan keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman, tahun 2013	<p>Variabel Independen :</p> <p>Kejelasan sasaran anggaran</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Variabel Intervening :</p> <p>Sistem pengendalian internal</p>	<p>Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, sistem pengendalian internal berpengaruh juga terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan merupakan variabel yang memediasi hubungan antara variabel independen dan dependen.</p>
2.	Darwanis dan Sephi Chairunnisa , tahun 2013	<p>Variabel Independen :</p> <p>Kejelasan sasaran anggaran, Pengawasan kualitas laporan keuangan, Penerapan akuntansi keuangan daerah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Akuntabilitas kinerja</p>	<p>Kejelasan sasasaran anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan penerapan akuntansi keuangan dan pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh</p>

NO	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		pemerintah	terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah
3.	Beny Arifin W, tahun 2012	<p>Variabel Independen :</p> <p>Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Variabel Moderasi :</p> <p>Komitmen Organisasi</p>	<p>Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Sedangkan pada partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.</p>
4.	Anwar, tahun 2018	<p>Variabel Independen :</p> <p>Pengendalian internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran</p>	<p>Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, kejelasan sasaran berpengaruh</p>

NO	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel Dependen : Kinerja Manajerial Variabel Moderasi : Komitmen Organisasi	negatif terhadap kinerja manajerial, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai moderasi, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai moderasi.
5.	Rona Efrizal, tahun 2017	Variabel Independen : Kejelasan anggaran, Akuntabilitas publik, dan sistem pelaporan Variabel Dependen : Kinerja Manajerial	Ketiga variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran akuntabilitas publik dan sistem pelaporan memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja manajerial.
6.	Reyhan Hady Fauzan, tahun 2017	Variabel Independen : Kejelasan saaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan penerapan akuntabilitas keuangan	Dari keempat variabel independen memberikan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan penerapan akuntabilitas

NO	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel Dependen : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	keuangan memberikan hasil yaitu memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7.	Asrini, tahun 2017	Variabel Independen : Kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan Akuntabilitas publik Variabel Dependen : Kinerja pemerintah	Kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah
8.	Netty Herawaty, tahun 2011	Variabel Independen : Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan Sistem pelaporan Variabel Dependen : Akuntabilitas kinerja	Kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh yang negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, sedangkan sistem pelaporan memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah
9.	Hari Setyawam, tahun 2017	Variabel Independen : Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada peraturan

NO	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pada Peraturan Perundangan Variabel Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Variabel Moderating : Kinerja manajerial	perundangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, interaksi antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan dengan kinerja manajerial juga memiliki hubungan yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

Dalam membuat anggaran, pemerintah daerah haruslah berorientasi pada hasil dan pencapaian kerja apa yang akan dicapai dalam satu periode, dengan anggaran yang tepat dan spesifik dapat memudahkan aparat pemerintah dalam mengimplementasikannya sehingga kinerja pemerintah akan meningkat begitupun dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sebaliknya, jika anggaran yang tidak jelas dan tidak spesifik maka aparat pemerintah daerah juga yang akan merasa kesulitan dalam melaksanakannya, dampaknya pada akuntabilitas yang akan menurun.

Sesuai dengan teori agensi yaitu pemerintah sebagai agen dalam melakukan penyusunan anggaran secara jelas dan spesifik semata-mata hanya agar mendapatkan hasil kinerja yang baik, dan nantinya hasil tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang bertindak sebagai principal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Kaltsum dan Roman (2013), Fauzan (2017), Setyawan (2017), dan Asrini (2017) dalam penelitiannya mendukung bahwa kejelasan sasaran memiliki pengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.2 Partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

Partisipasi dalam organisasi digunakan sebagai alat komunikasi antara pihak bawahan dan atasan, hal ini memunculkan adanya pertukaran informasi antara pihak atasan dan bawahan. Dari kegiatan pertukaran informasi inilah yang memberikan bawahan peluang untuk dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai penganggaran, sehingga dengan adanya peluang bagi berbagai pihak dalam proses penganggaran maka dapat meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja ini berarti sama saja dengan meningkatnya motivasi kerja para karyawan pemerintah untuk

dapat mencapai tujuan dan hasil kerja yang akan dicapai, oleh karena itu nantinya akuntabilitas kinerjanya juga akan mengalami peningkatan.

Keterkaitan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan akuntabilitas memiliki kesamaan terhadap teori agensi, yaitu dimana aparat pemerintah pihak atas maupun bawah yang terlibat dalam penyusunan anggaran yang bertindak sebagai agen dan masyarakat sebagai principal yang nantinya akan menilai hasil kinerja pemerintahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Arifin W (2012) dan Asrini (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2: Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.3 Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan komitmen organisasi

Komitmen organisasi dapat dilaksanakan ketika seseorang memiliki keyakinan dan kemampuan yang kuat dalam melaksanakan tugas dalam pekerjaannya hanya demi mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan kejelasan sasaran anggaran yang memiliki tujuan, anggaran dibuat dan ditetapkan secara

jelas dan spesifik supaya anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Kejelasan sasaran dalam sebuah anggaran dapat didukung oleh komitmen organisasi yang kuat dalam diri seorang karyawan/aparat pemerintah untuk dapat melakukan penyusunan anggaran yang jelas demi mewujudkan tujuan organisasi, sehingga akan berdampak pada akuntabilitas kinerjanya yang akan meningkat. Hal ini memungkinkan komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu hal ini memiliki kesesuaian dengan teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*), dalam sebuah organisasi pemerintahan tujuan dalam pembuatan anggaran adalah jelas dan spesifik agar dapat mudah dipahami oleh penggunanya, sehingga dengan adanya komitmen yang dimiliki setiap karyawan terhadap organisasi tersebut maka akan lebih mudah dalam penyusunan sebuah anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi, dengan adanya komitmen yang kuat maka akan berdampak pada kinerja pemerintah yaitu untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai moderasi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3: Komitmen Organisasi menguatkan pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

2.3.4 Partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan komitmen organisasi

Partisipasi anggaran dapat menjadikan sebuah organisasi melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan anggaran. Adanya pertukaran informasi antara atasan maupun bawahan dapat memberikan banyak peluang bagi pihak-pihak terkait untuk dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai penganggaran, sehingga dengan adanya peluang dalam proses penganggaran maka dapat meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja ini kemungkinan dampak dari adanya komitmen seorang karyawan/aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Maka dari itu, komitmen organisasi memungkinkan dapat memperkuat hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. Partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan didukung adanya komitmen organisasi yang kuat dari diri seorang karyawan/aparat pemerintah maka dapat meningkatkan motivasi kerjanya, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta akuntabilitas kerjanya juga akan meningkat.

Hal ini memiliki kesesuaian dengan teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*), peningkatan kinerja dalam penyusunan anggaran merupakan sebuah perwujudan partisipasi dari karyawan/aparat pemerintah, oleh karena itu dengan adanya sebuah komitmen yang kuat terhadap organisasi maka dapat

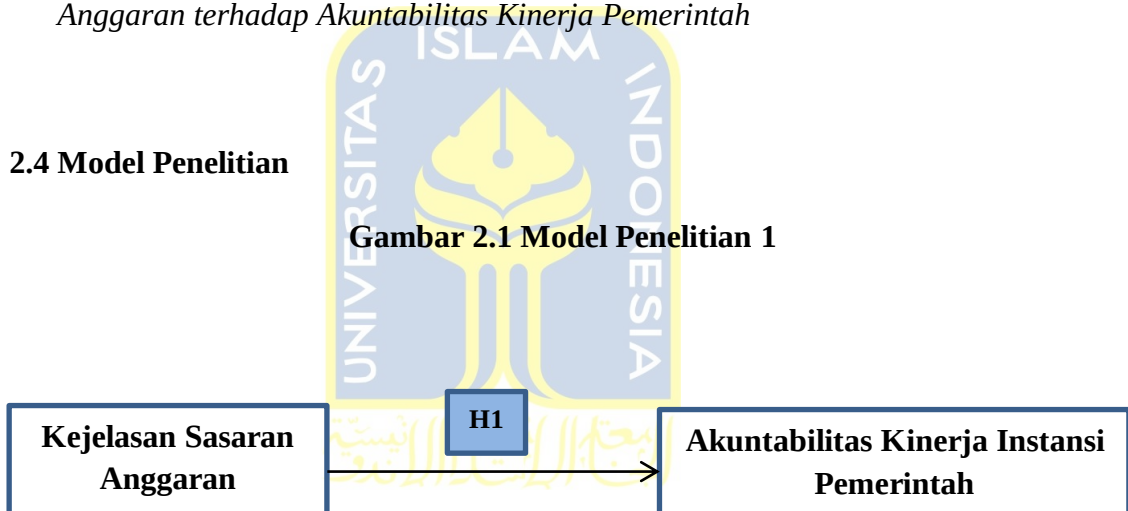
meningkatkan motivasi karyawan/aparat pemerintah dalam berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sehingga tujuan organisasi akan tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Duvamindra (2015) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai moderasi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

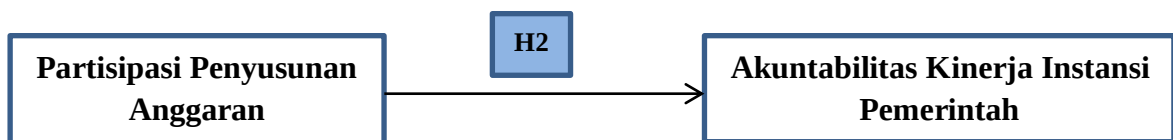
H4: Komitmen Organisasi menguatkan pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

2.4 Model Penelitian

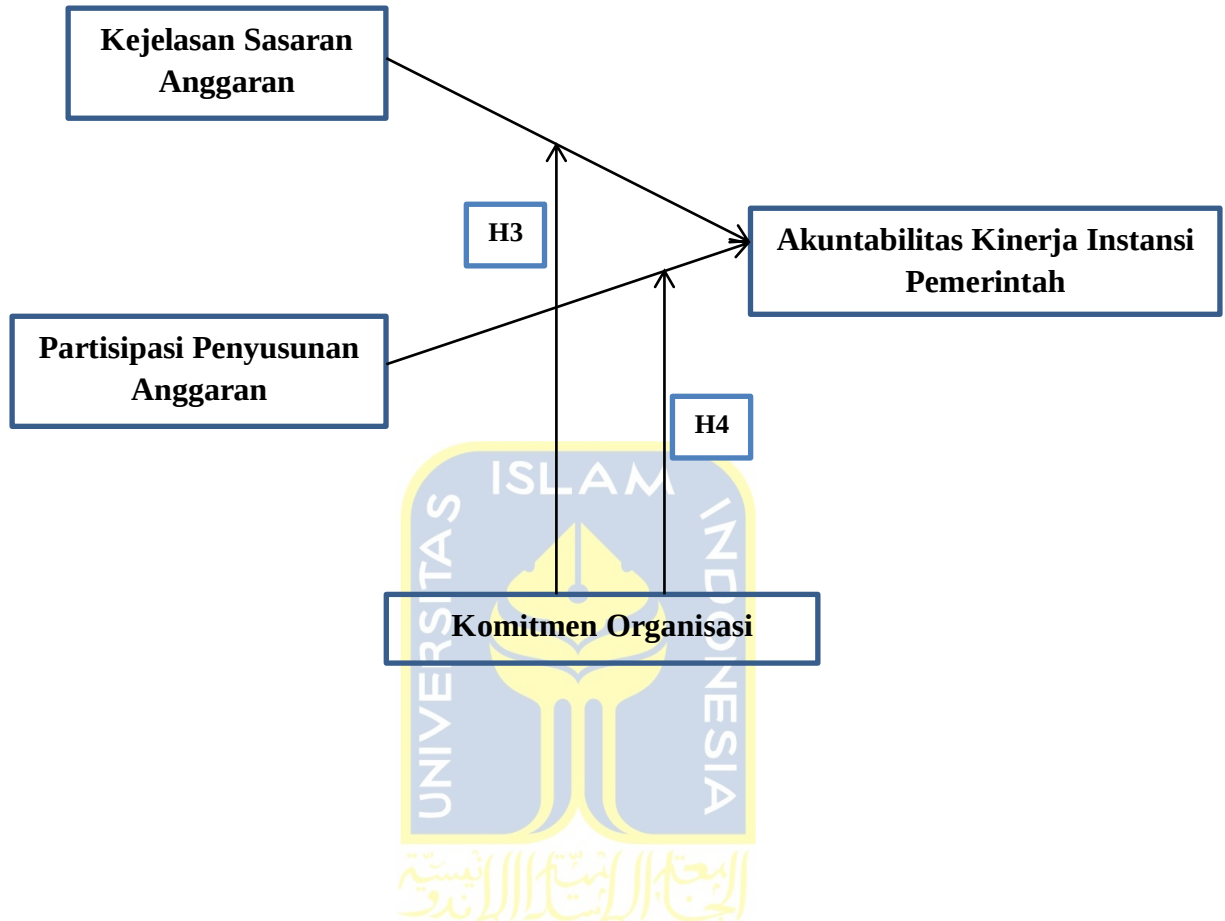
Gambar 2.1 Model Penelitian 1



Gambar 2.2 Model Penelitian 2



Gambar 2.3 Model Penelitian 3



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Penentuan Sampel

Penentuan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006 dalam Pratiwi dan Setyowati, 2017). Sampel yang akan digunakan yaitu pemerintah daerah di DIY pada bagian dengan kriteria pejabat struktural atau aparat yang memang paham mengenai proses penyusunan anggaran yang nantinya akan memudahkan tujuan dari penelitian ini karena responden yang sudah paham mengenai penganggaran.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer, data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang bersumber langsung dari responden yaitu aparat pemerintah daerah di DIY. Metode pengumpulan yang dilakukan yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden, yang dibuat berdasarkan indikator, melihat dari penelitian terdahulu serta menyesuaikan dengan keadaan objek penelitian. Kuesioner akan diberikan dalam bentuk skala likert, nantinya responden akan memilih jawaban antara sangat setuju hingga sangat tidak setuju dengan skala nilai 1-4.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua variabel yaitu independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdapat dua jenis yaitu kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.3.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Fauzan (2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan bagaimana tujuan anggaran dibuat dan ditetapkan secara jelas dan spesifik supaya anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Indikator pernyataan yang akan digunakan berdasar pada penelitian menurut Agustin (2018) dan Harahap (2017), kuesioner terdiri dari 8 pernyataan yang disusun menggunakan skala likert dengan skala nilai 1-5. Indikator yang ditanyakan dalam kuesioner berkaitan dengan, definisi, kemudahan anggaran untuk dipahami, kesesuaian dengan rencana kerja serta tujuan instansi, pengetahuan mengenai anggaran, kesesuaian dengan anggaran pendapatan dan belanja.

3.3.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama antara dua bagian atau lebih di mana keputusan tersebut akan berdampak di masa yang akan datang, dengan kata lain seluruh pihak dari tingkat bawah dapat

memiliki suaranya dalam proses penyusunan keputusan (Lubis, 2017:358). Partisipasi anggaran sektor publik menunjukkan bagaimana partisipasi bagi aparat pemerintah daerah baik atasan maupun bawahan terlibat dan mempunyai pengaruh dalam menentukan target anggaran. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Indikator pernyataan yang akan digunakan berdasar pada penelitian menurut Syarafina (2018) dan Wulandari (2013), kuesioner terdiri dari 6 pernyataan yang disusun menggunakan skala likert dengan skala nilai 1-5. Indikator yang ditanyakan dalam kuesioner berkaitan dengan, keterlibatan dalam penyusunan anggaran, kesediaan dan pengaruh dalam menerima pendapat, peningkatan motivasi kinerja.

3.3.3 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah tingkat sejauh mana seorang karyawan dapat memihak pada sebuah organisasi beserta tujuannya, dan ingin mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Lubis, 2017:83). Komitmen organisasi dapat dilaksanakan ketika seseorang memiliki keyakinan dan kemampuan yang kuat dalam melaksanakan tugas dalam pekerjaannya hanya demi mewujudkan tujuan organisasi. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Indikator pertanyaan yang akan digunakan berdasar pada penelitian menurut Wulandari (2013) dan Sakti (2017), kuesioner terdiri dari 8 pertanyaan yang disusun menggunakan skala likert dengan skala nilai 1-5. Indikator yang ditanyakan dalam kuesioner berkaitan dengan, keyakinan kuat untuk bekerja, tingkat keterlibatan dalam bekerja, tingkat ketertarikan dengan pekerjaan dan organisasi, serta perasaan menjadi bagian dari organisasi.

3.3.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Fauzan (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai demi mencapai tujuan, dengan menggunakan suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Dengan adanya akuntabilitas dapat menjadikan kinerja pemerintah menjadi perhatian masyarakat, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Indikator yang akan digunakan berdasar pada penelitian menurut Agustin (2018) dan Masdayani (2015), kuesioner terdiri dari 7 pernyataan yang disusun menggunakan skala likert dengan skala nilai 1-5. Indikator yang ditanyakan dalam kuesioner berkaitan dengan, definisi, keterkaitan anggaran dengan rencana kerja dan tujuan instansi, perencanaan anggaran, pelaporan akuntabilitas, pengawasan kinerja, pertanggungjawaban kerja.

3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data pada penilitan ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Teknik ini dapat menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah model persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots$$

$$Y = \alpha + \beta_2 X_2 + \dots$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z_1 + \beta_4 (X_1 Z_1) + \beta_5 (X_2 Z_1) + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X1 = Kejelasan sasaran Anggaran

X2 = Partisipasi Penyusunan Anggaran

Z1 = Komitmen Organisasi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi

α = Koefisien

e = eror

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan sebuah metode yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan, dan penyajian suatu data yang berguna untuk memberikan sebuah informasi. Selain itu statistik deskriptif adalah suatu bentuk transformasi data mentah menjadi data yang dapat dengan mudah dipahami bagi pembaca.

3.4.2 Uji Kualitas Data

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk membuktikan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur (variabel). Uji validitas adalah uji yang digunakan dalam mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52 dalam Efrizar, 2017).

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui ketepatan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan data kuisisioner, maka kuisisioner tersebut dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghazali (2009) dalam Wahyuni (2014) mengatakan bahwa uji reliabilitas merupakan alat ukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Metode yang dilakukan dalam uji reliabilitas yaitu menggunakan *cornbach alpha*, jika data memiliki koefisien *cornbach alpha* $> 0,6$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliabel.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

3.4.3.1 Uji multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara hubungan yang sempurna antara variable-variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Selain itu juga dapat diketahui melalui nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) yang dihasilkan oleh variabelvariabel independen.

3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji ini menggunakan metode diagram *Scatterplot*. Ketentuan penilaiannya yaitu jika ada titik yang membentuk pola tertentu dan beraturan, maka data tersebut terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak terdapat pola yang jelas dan menyebar ke atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.4.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian mengenai kenormalan distribusi data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak adalah dengan analisis grafik histogram serta uji statistik non-parametrik yaitu One Sample Kolmogorov Smirnov Test (1-Sample K-S).

3.4.4 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari Uji Hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam

menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat

Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

3.5 Hipotesis Operasional

3.5.1 Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

$H_0 \leq 0$: Kejelasan Sasaran Anggaran tidak memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

$H_1 > 0$: Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.5.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

$H_0 \leq 0$: Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

$H_1 > 0$: Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.5.3 Komitmen Organisasi memoderasi Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

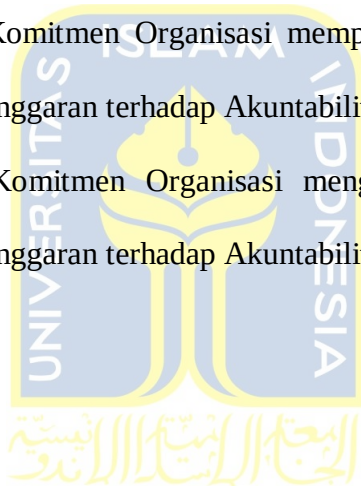
$H_0 \leq 0$: Komitmen Organisasi memperlemah pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

$H_1 > 0$: Komitmen Organisasi menguatkan pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

3.5.4 Komitmen Organisasi memoderasi Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

$H_0 \leq 0$: Komitmen Organisasi memperlemah pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

$H_1 > 0$: Komitmen Organisasi menguatkan pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden. Responden disini merupakan pejabat struktural dan karyawan yang memiliki pemahaman mengenai proses penyusunan anggaran yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 kuesioner, dimana 98 kuesioner kembali, sebanyak 69 kuesioner yang memenuhi kriteria untuk dapat diolah, dan sebanyak 29 kuesioner tidak dapat diolah karena pengisian data tidak lengkap. Berikut adalah ringkasan lebih lengkap mengenai pembagian kuesioner.

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Kuesioner

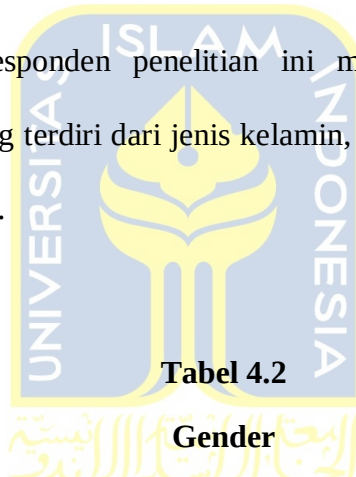
No	Nama SKPD	Kuesioner yang disebar	Kuesioner yang kembali	Kuesioner yang tidak kembali	Kuesioner yang dapat diolah	Kuesioner yang tidak dapat diolah
1	Inspektorat	10	10	0	6	4
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	10	0	9	1
3	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	10	9	1	5	4
4	Dinas Kebudayaan	10	6	5	3	3
5	Dinas Perhubungan	10	9	1	5	4
6	Dinas Sosial	10	10	0	9	1
7	Dinas Kesehatan	10	10	0	7	3
8	Dinas Pertanahan dan	10	8	2	5	3

No	Nama SKPD	Kuesioner yang disebar	Kuesioner yang kembali	Kuesioner yang tidak kembali	Kuesioner yang dapat diolah	Kuesioner yang tidak dapat diolah
	Tata Ruang					
9	Dinas Pekerjaan Umum	10	10	0	6	4
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	6	4	4	2
11	Dinas Pertanian	10	10	0	10	0
JUMLAH		110	98	13	69	29
Presentase		100%	89%	12%	70%	30%

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden penelitian ini mencakup deskripsi mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, jabatan, lama menjabat, dan pendidikan terakhir.

4.2.1 Gender



Tabel 4.2

Gender

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	29	42%
Laki-Laki	40	58%
Total	69	100%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat terlihat bahwa jumlah responden perempuan sebesar 29 dengan presentase 42%, sedangkan jumlah responden laki-laki sebesar 40 dengan presentase 58%.

4.2.2 Umur

Tabel 4.3

Umur

Umur	Jumlah	Presentase
21-25	0	0%
26-30	3	4%
31-35	5	7%
36-40	8	12%
41-45	18	26%
46-50	18	26%
51-55	14	20%
56-60	3	4%
Total	69	100%

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat terlihat bahwa responden dengan tingkat umur 41-45 tahun dan 46-50 tahun, dengan presentase masing-masing yaitu 26% dari total responden.

4.2.3 Jabatan

Tabel 4.4

Jabatan

Jabatan	Jumlah	Presentase
Kepala Sub Bagian	2	3%
Kepala Sub Bidang	7	10%
Kepala Seksi	6	9%
Fungsional Perencana	3	4%
Analisis Perencana	1	1%
Analisis Program	1	1%
Pengelola data Pemerintahan	1	1%
Staf Keuangan	3	4%
Staf BPTP	2	3%
Staf Program dan Monev	1	1%
Eselon IV	2	3%
Staf Pelaksana	2	3%
Staf Penyusun Anggaran	1	1%
Bendahara	1	1%

Jabatan	Jumlah	Presentase
Staf	36	52%
Total	69	100%

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat terlihat bahwa jabatan dengan jumlah dan presentase yang paling banyak mengisi kuesioner yaitu seorang staf dengan jumlah 36 orang dari total responden.

4.2.4 Lama Menjabat

Tabel 4.5
Lama Menjabat

Lama Menjabat	Jumlah	Presentase
0-5	30	43%
6-10	13	19%
11-15	4	6%
16-20	12	17%
21-25	3	4%
26-30	5	7%
31-35	2	3%
Total	69	100%

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat terlihat bahwa masa jabatan terbanyak yang mengisi kuesioner penelitian ini yaitu 0-5 tahun dengan presentase 43% dari total responden.

4.2.5 Pendidikan Terakhir

Tabel 4.6

Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
S2	20	29%
S1	34	49%
D3	6	9%
D4	1	1%
SMA	8	12%
Total	69	100%

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat terlihat pendidikan responden yang mengisi kuesioner ini yaitu S1 dengan jumlah 34 orang dengan presentase 49% dari total responden.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif ini merupakan proses transformasi data mentah dari sebuah kuesioner menjadi suatu data yang dapat memberikan suatu gambaran atau deskripsi mengenai data tersebut. Dalam penelitian ini hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standard deviation*.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
Kejelasan sasaran Anggaran	69	3	4	3,29	0,356
Partisipasi Penyusunan Anggaran	69	3	4	3,21	0,354
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	69	3	4	3,19	0,361
Komitmen Organisasi	69	2	4	2,86	0,383

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif di atas dapat terlihat bahwa nilai minimum dan maksimum dari keempat variabel yang didapatkan dalam data kuesioner yaitu 3 dan 4 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan dalam menjawab item pertanyaan kuesioner maka semakin berpengaruh tingkat variabel pada instansi pemerintah tersebut. Nilai rata-rata yang didapatkan setiap variabel yaitu 3,29, 3,21, 3,19, dan 2,86 yang merepresentasikan bahwa setiap variabel dalam penilitan ini sudah cukup baik dan tepat sasaran bagi instansi pemerintah. Sedangkan nilai standar deviasi yang didapatkan dapat diartikan bahwa ukuran penyebaran data dari setiap variabel yaitu sebesar 0,356 , 0,354 , 0,361 , dan 0,383 dari 69 responden.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk membuktikan valid atau tidaknya data kuesioner yang digunakan. Data dikatakan

valid jika r hitung $>$ r tabel. Berikut merupakan hasil pengujian validitas yang dilakukan menggunakan aplikasi spss.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	KSA1	0,679	0,000	Valid
	KSA2	0,695	0,000	Valid
	KSA3	0,762	0,000	Valid
	KSA4	0,779	0,000	Valid
	KSA5	0,543	0,000	Valid
	KSA6	0,663	0,000	Valid
	KSA7	0,617	0,000	Valid
	KSA8	0,792	0,000	Valid
Partisipasi Penyusunan Anggaran	PPA1	0,690	0,000	Valid
	PPA2	0,798	0,000	Valid
	PPA3	0,680	0,000	Valid
	PPA4	0,790	0,000	Valid
	PPA5	0,689	0,000	Valid
	PPA6	0,679	0,000	Valid
Komitmen Organisasi	KO1	0,574	0,000	Valid
	KO2	0,536	0,000	Valid
	KO3	0,760	0,000	Valid
	KO4	0,760	0,000	Valid
	KO5	0,632	0,000	Valid
	KO6	0,782	0,000	Valid
	KO7	0,748	0,000	Valid
	KO8	0,672	0,000	Valid
	AKIP1	0,784	0,000	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AKIP2	0,762	0,000	Valid
	AKIP3	0,764	0,000	Valid
	AKIP4	0,821	0,000	Valid
	AKIP5	0,544	0,000	Valid
	AKIP6	0,690	0,000	Valid
	AKIP7	0,618	0,000	Valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas di atas dapat diketahui nilai pearson correlation dan Sig. 2-tailed dari seluruh item pertanyaan kuesioner. Jika R-tabel dengan jumlah n=69 responden dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,2369. Melihat hasil R-tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan disetiap variabel penelitian mempunyai R-hitung lebih besar dari R-tabel, yang artinya seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan dalam penilitan ini karena bertujuan untuk mengetahui tingkat kestabilan responden dalam menjawab setiap pertanyaan kuesioner yang telah diberikan. Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas ini yaitu menggunakan *Cronbach's Alpha*, dengan ketentuan jika koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa data reliabel. Berikut merupakan hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan menggunakan aplikasi spss.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,838	Reliabel
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0,841	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,841	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,815	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat terlihat bahwa nilai Cronbach's Alpha setiap variabel lebih besar dari 0,60 atau mendekati 1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan kuesioner setiap variabel adalah reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan dalam penilitan ini karena bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel independen. Ketentuan pengujiannya dapat dilihat pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Data dianggap terdapat multikolinieritas jika nilai $VIF > 10$ atau nilai $Tolerance < 0,10$. Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan menggunakan aplikasi spss.

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Variance Inflation Factor (VIF)	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,531	1,882	Tidak terdapat Multikolinearitas
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0,531	1,882	Tidak terdapat Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas dapat terlihat bahwa hasil nilai Tolerance dan VIF untuk variabel kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,531 dan 1,882. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk kedua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai $Tolerance > 0,10$ dan nilai $VIF < 10$, yang artinya bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel.

4.5.2 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residu (pengganggu) memiliki distribusi normal. Ketentuan dalam uji ini yaitu jika signifikansi $> \alpha$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil pengujian normalitas yang dilakukan menggunakan aplikasi spss.

Tabel 4.11

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,23651986
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,102
	Negative	-,095
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

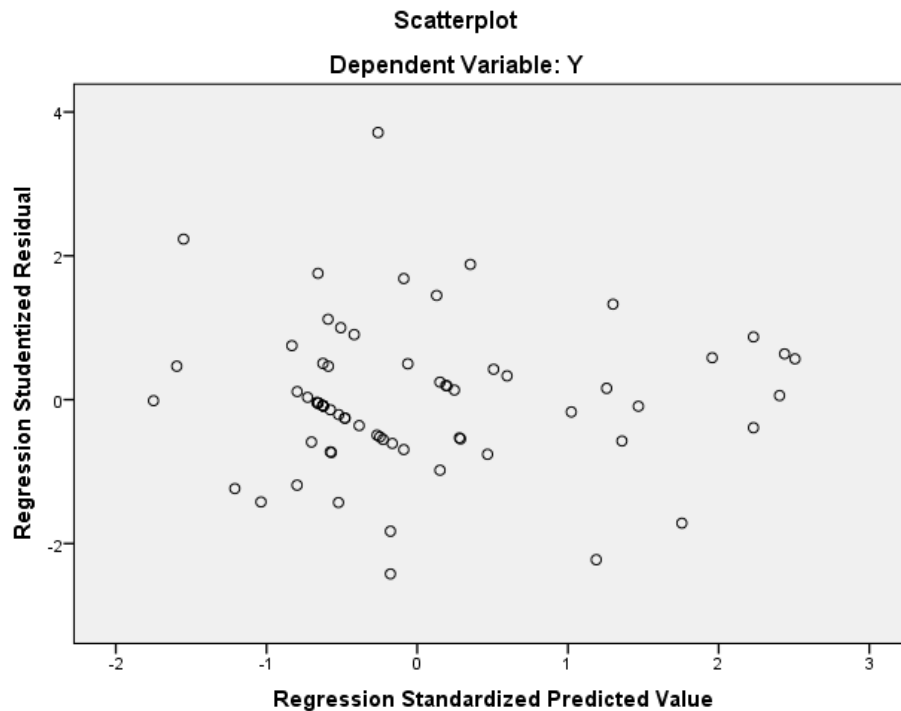
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,073 lebih besar dari 0,05. Sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak.

4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Uji heterokedastisitas dilakukan menggunakan diagram *Scatterplot*. Ketentuan penilaiannya yaitu, jika titik yang ada dalam diagram membentuk pola tertentu serta menyempit maka terjadi heterokedastisitas, dan jika titik yang ada dalam diagram menyebar di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil pengujian heterokedastisitas yang dilakukan menggunakan aplikasi spss.

Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas di atas menunjukkan gambar diagram Scatterplot yang dapat diambil kesimpulan bahwa titik yang terdapat pada gambar menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, yang memiliki arti bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

4.6.1 Persamaan 1

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 1

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,169	,327		3,577	,001
X1	,614	,099	,605	6,222	,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji regresi linier di atas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1,169 + 0,614 X_1$$

Dari persamaan di atas dapat terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 1,169 yang berarti bahwa jika variabel kejelasan sasaran anggaran dianggap konstan, maka besarnya akuntabilitas kinerja sebesar 1,169. Nilai koefisien variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,614 yang berarti bahwa variabel tersebut jika meningkat sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,614 satuan.

4.6.2 Persamaan 2

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,761	,272		2,802	,007
X2	,756	,084	,740	9,002	,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji regresi linier di atas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,761 + 0,756 X_2$$

Dari persamaan di atas dapat terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 0,761 yang berarti bahwa jika variabel partisipasi penyusunan anggaran dianggap

konstan, maka besarnya akuntabilitas kinerja sebesar 0,761. Nilai koefisien variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,756 yang berarti bahwa variabel tersebut jika meningkat sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,756 satuan.

4.6.3 Persamaan 3

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 3

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,703	,329		2,140	,036
	X1	-,236	,875	-,233	-,270	,788
	X2	,941	,898	,921	1,048	,299
	X1.Z	,145	,312	,789	,464	,644
	X2.Z	-,122	,320	-,658	-,383	,703

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji regresi linier di atas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,703 + (-0,236) X1 + 0,941 X2 + 0,145 (X1.Z) + (-0,122) (X2.Z)$$

Dari persamaan di atas dapat terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 0,703 yang berarti bahwa jika variabel kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran dianggap konstan, maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,703.

Nilai koefisien interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi (X1.Z) sebesar 0,145 yang berarti bahwa variabel tersebut jika meningkat sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan

meningkat sebesar 0,145 satuan. Sedangkan untuk interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi (X2.Z) didapatkan nilai koefisien sebesar -0,122 yang berarti bahwa variabel tersebut jika meningkat sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun sebesar 0,122 satuan.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Hipotesis 1

H1 : Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.12 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 di tolak, hal ini berarti menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hasil penelitian ini dengan adanya kejelasan sasaran anggaran merupakan hal yang penting bagi instansi pemerintah, selain itu hasil penelitian ini juga membuktikan salah satu teori yaitu teori agensi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roman (2013), Fauzan (2017), Setyawan (2017), dan Asrini (2017) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.7.2 Hipotesis 2

H2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.13 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 di tolak, hal ini berarti menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dapat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga hipotesis kedua dapat diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hasil penelitian ini dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran dalam proses penyusunan anggaran merupakan hal yang berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, selain itu hasil penelitian ini juga membuktikan salah satu teori yaitu teori agensi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin W (2012) dan Asrini (2017) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.7.3 Hipotesis 3

H3: Komitmen Organisasi menguatkan pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.13 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,644 yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu

dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya bahwa variabel komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam hasil penelitian ini bahwa terdapat kemungkinan kurang optimalnya komitmen organisasi yang dapat terlihat dari nilai mean hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.7 yaitu sebesar 2,86, sehingga tidak dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam proses penyusunan anggaran pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin W (2012) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai moderasi.

4.7.4 Hipotesis 4

H4 : Komitmen Organisasi menguatkan pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.13 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,703 yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, dengan demikian komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam hasil penelitian ini bahwa terdapat kemungkinan kurang optimalnya komitmen organisasi yang dapat terlihat dari nilai mean hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.7 yaitu sebesar 2,86, sehingga tidak dapat

meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam berpartisipasi untuk proses penyusunan anggaran instansi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin W (2012) dan Kusuma (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai moderasi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian data kuesioner dari para karyawan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total 11 SKPD, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Semakin baik kejelasan anggaran maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga hipotesis kedua dapat diterima. Semakin baik partisipasi penyusunan anggaran maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan partisipasi penyusunan anggaran, sehingga hipotesis ketiga tidak dapat diterima. Komitmen organisasi dalam pemerintahan daerah kemungkinan masih kurang optimal sehingga tidak mempengaruhi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan partisipasi penyusunan anggaran, sehingga hipotesis ketiga tidak dapat diterima. Komitmen organisasi dalam pemerintahan daerah kemungkinan masih kurang optimal sehingga tidak mempengaruhi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang kemungkinan dapat berpengaruh pada hasil penelitian, antara lain yaitu :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada 11 SKPD dari total 43 SKPD yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga jumlah sampelnya relatif sedikit. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa SKPD yang memberikan waktu penyelesaian pengisian kuesioner relatif panjang.

Berdasarkan keterbatasan tersebut maka sebaiknya dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi dan sampel data agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang diperoleh diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

Bagi Instansi pemerintah daerah lainnya diharapkan untuk dapat menerapkan kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran

demikian mencapai akuntabilitas instansi yang baik, karena dari hasil penelitian ini terbukti bahwa kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, K. (2018). Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Arifin.W, B. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal AKuntansi & Investasi*, 13(1), 15–27.
- Asrini. (2017). Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja skpd di pemerintah daerah kota palu. *E Journal Katalogis*, 5(1), 52–58.
- Anwar. (2018). Efek Moderasi Dari Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Pengendalian Intern Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros). *Bongaya Journal for Researcg in Accountngi*, 1(1), 30-39.
- Anthony, R. N, Govindarajan, V. (2005). Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi. Ke-11. (Kurniawan Tjakrawata dan Krista, Penterjemah.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Biduri, S. (2011). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Pemoderasi Gaya Kepemimpinan Dan Komitmen Organisasi Pada Pemkab Lamongan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, 8(1), 41-56.
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P. ., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh pengawasan, akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja pegawai (studi kasus pada dinas perhubungan kota tidore kepulauan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 72–79.
- Duvamindra, G. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Vraiabel Moderating (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Surakarta). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Damaianti, I. (2014). Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(2), 150–174.
- Efrizar, R. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial. *Journal Online*

Mahasiswa, 4(1), 1726–1740.

Harahap, F. Z. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Herawaty, N. (2011). Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 13(1975), 31–36.

Ibrahim, N. A. (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Widyatama.

Iftikartriputra, I. (2010). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama.

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Indonesia, R. (2014). Peraturan-Presiden-No.29-Tahun-2014. Tentang Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kinerja instansi pemerintah.

Intihanah, & S, N. A. M. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 67–79.

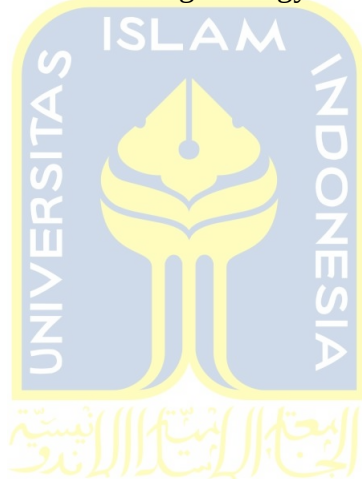
Kaltsum, U., & Rohman, A. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2012), 1–14.

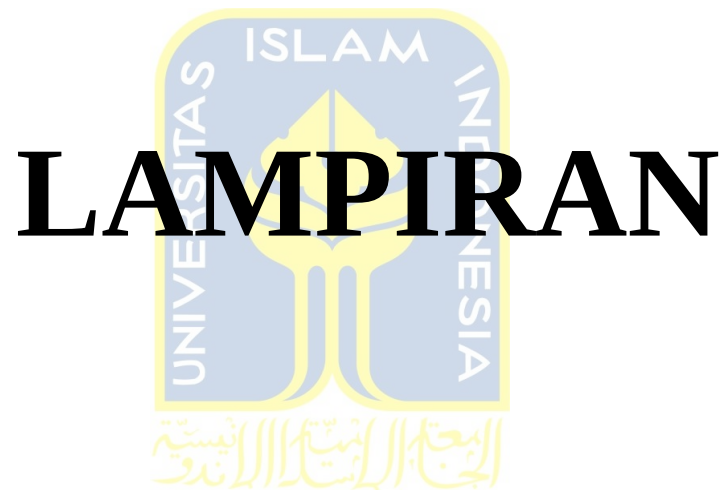
Kusuma, B. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial : Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 203-213.

Lubis, A. I. (2017). Akuntansi Keperilakuan: Akuntansi Multiparadigma (Edisi Ke-3). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Masdayani, A. (2015). Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

- Muhammad Yusuf Ateh. (2018). Laporan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pratiwi, R. D., & Setyowati, L. (2017). Determinan Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 94–102.
- Sofyani, H. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja "A". *Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64.
- Sakti, K. (2017). Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus SKPD Kabupaten Sleman). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Assalamualaikum.wr.wb

Bersama ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner penelitian saya yang berjudul **“Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

Kuesioner ini terdiri dari sejumlah pernyataan, mohon Bapak/Ibu untuk menjawab semua pernyataan secara terbuka, jujur, dan apa adanya. Jawaban akan terjaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.

Akhir kata Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Wassalamuallaikum wr.wb

Mengetahui,

Pembimbing skripsi

Penulis

Isti Rahayu, Dra.,M.Si., Ak.

SiltaAglisnema

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : (Boleh Tidak Diisi)

Gender : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur :

Badan/Dinas :

Jabatan :

Lama Menjabat :

Pendidika terakhir :

Cara Pengisian Kuesioner :

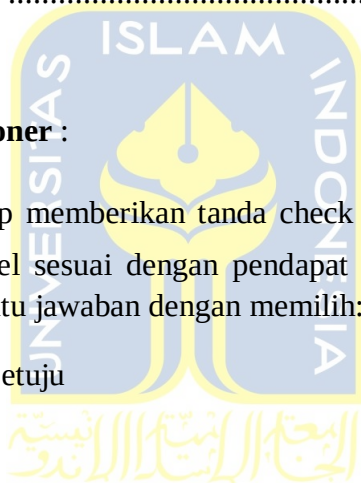
Bapak/Ibu cukup memberikan tanda check list (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia pada tabel sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dengan memilih:

1. STS : Sangat Tidak Setuju

2. TS : Tidak Setuju

3. S : Setuju

4. SS : Sangat Setuju



1. Kejelasan Sasaran Anggaran

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Anggaran telah terdefiniskan secara jelas				
2.	Anggaran dapat dengan mudah dipahami				
3.	Anggaran telah disesuaikan dengan rencana kerja				
4.	Rencana kerja dan rencana anggaran telah memenuhi tujuan instansi				
5.	Dalam menerapkan sebuah anggaran perlu pengetahuan yang tinggi untuk dapat mencapai sasaran				
6.	Anggaran telah disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara				
7.	Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan faktor yang mendukung tujuan instansi				
8.	Rencana anggaran telah terlaksana sesuai dengan sasaran				

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Dalam penyusunan anggaran telah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam anggaran				
2.	Saya dapat menerima pendapat dari berbagai pihak dengan baik				
3.	Partisipasi kerja dapat memiliki pengaruh besar bagi keberhasilan kerja				

4.	Para karyawan secara aktif ikutserta dalam memberikan pendapat dalam penganggaran				
5.	Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat memotivasi kerja				
6.	Pendapat dari berbagai pihak pernah/sering digunakan karena menunjang keberhasilan anggaran				

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Kejelasan sasaran anggaran telah dimengerti oleh semua pihak				
2.	Rencana anggaran yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan instansi				
3.	Adanya keterkaitan antara pencapaian dengan rencana program kerja				
4.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan indikator ukuran yang jelas				
5.	LAKIP merupakan acuan dan bahan pertimbangan dalam merencanakan rencana kerja				
6.	Pimpinan dan staff telah terlibat secara bersama dalam melaksanakan program				
7.	Seluruh pihak secara bersama telah mempertanggungjawabkan hasil kerja yang telah dilaksanakan				

4. Komitmen Organisasi

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Saya memiliki keyakinan yang tinggi bahwa karier saya akan baik di tempat saya bekerja saat ini				
2.	Organisasi ini memberikan inspirasi yang terbaik bagi saya sehingga saya memiliki target jabatan dimasa yang akan datang				
3.	Saya merasa bangga dan puas bekerja di tempat ini				
4.	Saya sangat menginginkan pekerjaan ini sejak lama karena nilai-nilai yang dianut sangat mirip dengan saya				
5.	Saya ingin lebih berkontribusi dalam pekerjaan saya saat ini, karena saya merasa masalah yang terdapat di organisasi ini adalah masalah saya				
6.	Untuk saat ini tidak ada keinginan untuk meninggalkan organisasi				
7.	Saya merasa keberatan jika harus meninggalkan organisasi				
8.	Saya merasa diakui dengan apa yang saya kerjakan saat ini				

LAMPIRAN 2 :
DATA RESPONDEN

Responden	Jenis Kelamin	Umur	Dinas	Jabatan	Lama Menjabat	Pendidikan Terakhir
1	Perempuan	38 tahun	Bappeda	Fungsional Perencana	3 tahun	S2
2	Laki-laki	36 tahun	Bappeda	Calon Perencana	1 bulan	S2
3	Laki-laki	28 tahun	Bappeda	Pengelola Data Pemerintahan	1 tahun	S1
4	Laki-laki	38 tahun	Bappeda	Perencana	2 tahun	S1
5	Laki-laki	43 tahun	Bappeda	Staff	11 tahun	S1
6	Laki-laki	41 tahun	Bappeda	Analisis Perencanaan	6 tahun	S1
7	Laki-laki	53 tahun	Bappeda	Analisis Program	28 tahun	S1
8	Perempuan	36 tahun	Bappeda	Kepala Sub Bidang	1 tahun	S2
9	Perempuan	50 tahun	Bappeda	Kepala Sub Bidang	1 bulan	S2
10	Perempuan	50 tahun	Dinas Pertanian	Staff tanaman pangan	21 tahun	D3
11	Laki-laki	47 tahun	Dinas Pertanian	Staff Keuangan	30 tahun	SMA
12	Laki-laki	46 tahun	Dinas Pertanian	Staff Kepegawaian	22 tahun	D3
13	Laki-laki	52 tahun	Dinas Pertanian	Staff Kepegawaian	20 tahun	S1
14	Perempuan	49 tahun	Dinas Pertanian	Staff Keuangan	19 tahun	SMA
15	Laki-laki	50 tahun	Dinas Pertanian	Staff Umum	20 tahun	S1
16	Perempuan	44 tahun	Dinas Pertanian	Staff Umum	12 tahun	SMA
17	Laki-laki	46 tahun	Dinas Pertanian	Staff BPTP	10 tahun	S1
18	Perempuan	51 tahun	Dinas Pertanian	Staff BPTP	17 tahun	SMA
19	Laki-laki	49 tahun	Dinas Pertanian	Staff tanaman pangan	19 tahun	S1
20	Laki-laki	41 tahun	Dinas Pekerjaan Umum	Staff	14 tahun	S1
21	Laki-laki	33 tahun	Dinas Pekerjaan Umum	Staff	8 tahun	S1
22	Laki-laki	33 tahun	Dinas Pekerjaan Umum	Staff	8 tahun	S1
23	Laki-laki	47 tahun	Dinas Pekerjaan Umum	Staff Administrasi	1 tahun	SMA
24	Laki-laki	42 tahun	Dinas Pekerjaan Umum	Staff	21 tahun	S2
25	Laki-laki	42 tahun	Dinas Pekerjaan Umum	Staff	8 tahun	S2
26	Perempuan	46 tahun	Inspektorat	Staff Program dan Monev	20 tahun	S1
27	Laki-laki	39 tahun	Inspektorat	Kepala Sub Bagian Program dan Mo	1 tahun	S2
28	Laki-laki	43 tahun	Inspektorat	Staff Keuangan	20 tahun	S1
29	Perempuan	45 tahun	Inspektorat	Staff	19 tahun	D3
30	Laki-laki	45 tahun	Inspektorat	Staff	20 tahun	S1
31	Perempuan	56 tahun	Inspektorat	ES IV	10 tahun	S1
32	Perempuan	55 tahun	Dinas Sosial	Staff Pelaksana	33 tahun	SLTA
33	Perempuan	47 tahun	Dinas Sosial	Staff Pelaksana	10 tahun	S1
34	Perempuan	52 tahun	Dinas Sosial	Staff Umum	20 tahun	S1
35	Laki-laki	46 tahun	Dinas Sosial	Staff Umum	15 tahun	S1
36	Laki-laki	53 tahun	Dinas Sosial	Staff Sub Bagian Program	3 tahun	D4
37	Perempuan	38 tahun	Dinas Sosial	Staff Sub Bagian Program	9 tahun	S1
38	Laki-laki	30 tahun	Dinas Sosial	Staff Sub Bagian Program	5 tahun	S1
39	Laki-laki	37 tahun	Dinas Sosial	Staff Penyusun Anggaran	1 tahun	S1
40	Perempuan	42 tahun	Dinas Sosial	Staff	10 tahun	S1
41	Perempuan	40 tahun	Dinas Kesehatan	Staff	8 tahun	S2
42	Perempuan	36 tahun	Dinas Kesehatan	Staff	8 tahun	S2
43	Perempuan	27 tahun	Dinas Kesehatan	Staff Administrasi	4 tahun	S1
44	Perempuan	43 tahun	Dinas Kesehatan	Kepala Sub Bagian	3 tahun	S2
45	Laki-laki	39 tahun	Dinas Kesehatan	Staff Informasi dan Jaringan	1 bulan	D3
46	Perempuan	54 tahun	Dinas Kesehatan	Staff	30 tahun	D3
47	Perempuan	51 tahun	Dinas Kesehatan	Staff	28 tahun	D3
48	Perempuan	58 tahun	Dinas Perindustrian	Kepala Seksi	4 tahun	S1
49	Perempuan	55 tahun	Dinas Perindustrian	Kepala Bidang	15 hari	S2
50	Perempuan	50 tahun	Dinas Perindustrian	Kepala Seksi	5 tahun	S2
51	Laki-laki	50 tahun	Dinas Perindustrian	Kepala Seksi	3 tahun	S2
52	Perempuan	43 tahun	Dinas Kebudayaan	Bendahara	4 tahun	S1
53	Laki-laki	42 tahun	Dinas Kebudayaan	Staff Administrasi	2 tahun	S1
54	Perempuan	52 tahun	Dinas Kebudayaan	Staff Kearsipan	4 tahun	SMA
55	Perempuan	46 tahun	Dikpora	Staff	10 tahun	S1
56	Laki-laki	52 tahun	Dikpora	Staff	18 tahun	S1
57	Perempuan	42 tahun	Dikpora	Staff	9 tahun	S2
58	Laki-laki	54 tahun	Dikpora	Staff	31 tahun	S1
59	Laki-laki	44 tahun	Dikpora	Staff	16 tahun	S1
60	Perempuan	51 tahun	Dinas Perhubungan	Staff	28 tahun	SMA
61	Laki-laki	45 tahun	Dinas Perhubungan	Kepala Seksi	1 tahun	S2
62	Laki-laki	49 tahun	Dinas Perhubungan	Kepala Bidang	4 tahun	S2
63	Laki-laki	49 tahun	Dinas Perhubungan	Kepala Bidang	2 tahun	S2
64	Laki-laki	44 tahun	Dinas Perhubungan	Eselon IV	2 tahun	S2
65	Laki-laki	54 tahun	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang	1 tahun	S1
66	Laki-laki	56 tahun	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang	1 tahun	S2
67	Laki-laki	40 tahun	Dinas Pertanahan	Kepala Seksi	2 tahun	S2
68	Laki-laki	50 tahun	Dinas Pertanahan	Staff Pengelola Tata Ruang	1 tahun	S1
69	Laki-laki	41 tahun	Dinas Pertanahan	Kepala Seksi	1 tahun	S1

LAMPIRAN 3
JAWABAN KUESIONER

1. Kejelasan Sasaran Anggaran

NO	KSA 1	KSA 2	KSA 3	KSA 4	KSA 5	KSA 6	KSA 7	KSA 8
1	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	3	3	4	3	4	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	3	3	4	2	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	4	4	3	3	4
11	3	3	3	3	3	3	4	4
12	3	3	3	3	4	4	3	3
13	4	3	3	3	4	4	4	3
14	3	3	3	4	4	3	3	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	4	3	4	3	4	3	4
18	3	3	4	3	4	4	3	3
19	3	4	3	3	3	3	4	4
20	3	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	4	3	3	3
22	4	4	4	3	2	3	3	3
23	3	2	3	3	3	3	3	2
24	3	3	3	3	2	3	3	3
25	3	4	3	3	4	3	4	3
26	3	3	3	3	4	4	3	3
27	3	3	3	3	3	3	4	3
28	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3	3	3	3
30	4	4	4	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3
32	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	2	3	3	4	3	2	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3

NO	KSA 1	KSA 2	KSA 3	KSA 4	KSA 5	KSA 6	KSA 7	KSA 8
35	3	3	3	3	3	3	3	3
36	4	4	4	4	3	3	3	4
37	3	4	4	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3
43	4	3	3	3	2	4	4	3
44	3	3	3	3	4	3	4	3
45	4	4	4	3	4	4	3	3
46	3	3	3	3	3	3	3	3
47	3	4	3	2	4	2	3	3
48	2	3	2	2	3	3	3	2
49	4	3	3	2	3	3	3	3
50	4	4	3	4	4	3	4	3
51	3	3	3	3	3	4	3	3
52	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4
55	3	3	3	3	4	4	3	4
56	4	3	3	3	4	3	3	3
57	4	4	3	3	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3	4	3
60	4	4	4	3	4	3	3	4
61	4	4	4	3	3	3	3	4
62	4	4	4	3	3	3	3	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4
65	3	3	3	3	4	3	3	3
66	4	3	4	3	3	3	4	3
67	3	3	3	3	4	4	4	4
68	3	3	3	3	3	3	3	2
69	3	3	3	3	4	4	3	4

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran

NO	PPA 1	PPA 2	PPA 3	PPA 4	PPA 5	PPA 6
1	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	2	3	3
5	3	3	3	3	4	3
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	4	3
11	3	3	3	3	3	4
12	4	4	3	3	3	3
13	4	4	4	4	3	4
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	4	3	3
16	4	4	3	3	4	2
17	3	4	4	4	3	3
18	3	3	3	3	4	3
19	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	2	3	3
21	4	3	3	3	3	3
22	4	3	3	2	3	3
23	2	3	3	2	3	3
24	3	3	4	2	3	3
25	4	4	4	4	4	3
26	4	3	3	3	3	3
27	3	3	4	3	4	3
28	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3	3
30	2	3	3	3	4	3
31	3	3	3	3	3	3
32	4	4	4	3	3	3
33	3	3	4	2	2	3
34	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3
36	4	3	4	3	3	3
37	4	4	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3

NO	PPA 1	PPA 2	PPA 3	PPA 4	PPA 5	PPA 6
39	4	3	3	3	3	3
40	4	4	4	4	4	4
41	3	4	3	3	3	3
42	3	3	4	3	3	3
43	4	4	4	3	4	3
44	4	4	4	4	4	4
45	3	3	4	3	3	3
46	3	3	3	3	3	3
47	4	3	3	2	3	3
48	3	2	3	3	3	3
49	4	3	3	3	3	2
50	4	4	4	3	4	3
51	3	3	3	3	3	3
52	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	3	3	3
54	4	4	3	4	4	4
55	3	3	3	2	3	3
56	3	3	4	3	3	3
57	3	3	3	2	2	2
58	3	3	3	3	3	3
59	4	3	4	4	3	3
60	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4
65	3	3	3	3	3	3
66	3	4	4	3	3	3
67	3	4	4	3	3	3
68	3	3	3	3	3	3
69	3	4	4	3	3	3

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NO	AKIP 1	AKIP 2	AKIP 3	AKIP 4	AKIP 5	AKIP 6	AKIP 7
1	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
4	2	3	3	3	3	2	2
5	3	3	3	4	4	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	4	3	3
10	3	2	2	2	3	3	3
11	4	4	4	4	4	4	4
12	4	3	3	4	4	4	3
13	4	4	4	4	3	3	3
14	3	3	3	3	4	3	4
15	4	4	4	4	4	3	3
16	3	3	3	4	3	4	3
17	4	4	4	3	2	3	4
18	3	3	2	3	3	2	3
19	3	2	2	2	3	3	4
20	2	3	3	2	3	3	2
21	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	2	3	3	3
23	3	3	3	3	3	4	4
24	3	3	3	3	3	3	3
25	4	3	3	3	3	4	4
26	4	4	4	4	3	3	3
27	3	3	4	4	3	3	3
28	3	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3
33	2	3	2	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	4	4	4	3	3
37	3	3	3	4	3	4	3
38	2	3	3	3	4	3	3

NO	AKIP 1	AKIP 2	AKIP 3	AKIP 4	AKIP 5	AKIP 6	AKIP 7
39	3	3	3	3	3	3	3
40	4	4	4	4	4	4	4
41	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	4	4	3	4	3
44	3	3	4	3	3	3	4
45	3	3	3	3	3	4	4
46	3	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	3	4
48	3	2	3	3	3	3	3
49	3	3	4	4	3	4	3
50	4	3	4	4	4	4	4
51	2	3	3	3	3	3	3
52	4	4	4	4	4	4	4
53	3	4	3	4	3	4	4
54	4	4	4	4	3	4	4
55	3	3	3	3	4	3	3
56	3	3	3	3	3	3	3
57	2	3	3	2	3	3	3
58	3	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	3	4	3
60	3	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	3	3
65	3	3	3	4	4	3	3
66	3	3	4	3	3	3	3
67	3	3	4	3	3	3	3
68	2	3	3	3	3	3	3
69	3	3	4	3	3	3	4

4. Komitmen Organisasi

NO	KO 1	KO 2	KO 3	KO 4	KO 5	KO 6	KO 7	KO 8
1	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	3	3	2	2	2	3
3	3	3	3	3	3	3	2	3
4	3	3	3	3	3	2	2	4
5	3	3	2	2	3	2	2	2
6	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	2	3	2	2	3
9	4	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	2	2	2	2	2	3
11	3	4	2	2	1	2	3	2
12	3	3	3	2	2	2	2	3
13	4	3	3	2	2	3	2	3
14	3	2	2	3	1	2	2	3
15	4	4	4	2	3	2	2	2
16	2	2	2	3	2	3	3	2
17	3	2	2	2	3	2	2	2
18	2	3	3	2	3	2	2	2
19	2	2	3	3	3	3	2	2
20	2	2	2	2	2	3	2	3
21	3	2	3	2	2	3	3	3
22	3	3	3	2	3	3	1	3
23	3	3	3	3	2	3	3	3
24	3	3	4	3	3	3	3	3
25	3	2	3	2	3	3	2	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	2	4	4	2	3
28	4	3	4	4	3	4	3	4
29	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	4	4	4
32	3	3	3	3	3	4	4	3
33	4	4	4	4	3	4	4	3
34	3	2	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3	3	3	3
37	3	2	3	3	3	3	2	3
38	2	3	3	3	3	3	3	3

NO	KO 1	KO 2	KO 3	KO 4	KO 5	KO 6	KO 7	KO 8
39	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	3	3	3
46	3	3	3	2	3	3	3	3
47	3	2	3	3	3	4	3	3
48	2	2	2	2	2	2	2	2
49	3	3	3	2	3	3	3	3
50	4	3	3	3	4	3	2	3
51	3	3	3	2	3	3	3	3
52	3	3	4	4	4	4	4	4
53	3	2	4	4	3	4	4	4
54	3	3	3	3	3	4	4	4
55	3	3	2	2	3	3	3	3
56	3	3	3	3	3	3	3	3
57	2	2	2	2	3	3	2	3
58	3	3	3	3	3	3	3	3
59	2	2	3	3	3	3	2	3
60	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	2	3	2	2	2	2	3
62	3	2	3	2	2	2	2	3
63	4	4	4	4	4	4	4	4
64	3	3	3	3	3	3	3	3
65	4	3	4	3	3	3	2	3
66	3	3	3	2	3	3	2	3
67	3	2	2	2	3	3	2	3
68	3	3	3	3	3	3	3	3
69	3	3	2	2	3	3	2	3

LAMPIRAN 4
KARAKTERISTIK RESPONDEN

TABEL 4.2
GENDER

Gender	Jumlah	Presentase
Perempuan	29	42%
Laki-Laki	40	58%
Total	69	100%

TABEL 4.3
UMUR

Umur	Jumlah	Presentase
21-25	0	0%
26-30	3	4%
31-35	5	7%
36-40	8	12%
41-45	18	26%
46-50	18	26%
51-55	14	20%
56-60	3	4%
Total	69	100%

TABEL 4.4**JABATAN**

Jabatan	Jumlah	Presentase
Kepala Sub Bagian	2	3%
Kepala Sub Bidang	7	10%
Kepala Seksi	6	9%
Fungsional Perencana	3	4%
Analisis Perencana	1	1%
Analisis Program	1	1%
Pengelola data Pemerintahan	1	1%
Staf Keuangan	3	4%
Staf BPTP	2	3%
Staf Program dan Monev	1	1%
Eselon IV	2	3%
Staf Pelaksana	2	3%
Staf Penyusun Anggaran	1	1%
Bendahara	1	1%
Staf	36	52%
Total	69	100%

TABEL 4.5**LAMA MENJABAT**

Lama Menjabat	Jumlah	Presentase
0-5	30	43%
6-10	13	19%
11-15	4	6%
16-20	12	17%
21-25	3	4%
26-30	5	7%
31-35	2	3%
Total	69	100%

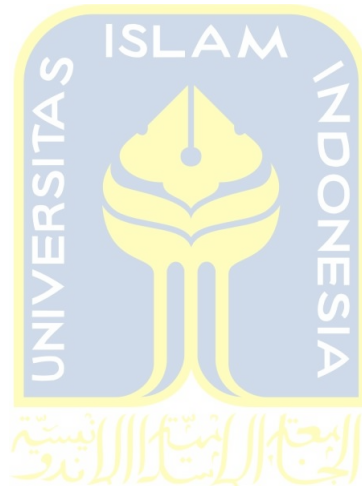
TABEL 4.6
PENDIDIKAN TERAKHIR

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
S2	20	29%
S1	34	49%
D3	6	9%
D4	1	1%
SMA	8	12%
Total	69	100%



LAMPIRAN 5
UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	69	3	4	3,29	,356
X2	69	3	4	3,21	,354
Y	69	3	4	3,19	,361
Z	69	2	4	2,86	,383
Valid N (listwise)	69				



LAMPIRAN 6

UJI VALIDITAS DATA

6.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

		Correlations								
		KSA1	KSA2	KSA3	KSA4	KSA5	KSA6	KSA7	KSA8	JUMLA H
KSA1	Pearson Correlation	1	,532**	,714**	,407**	,163	,304*	,274*	,396**	,679**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,180	,011	,023	,001	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KSA2	Pearson Correlation	,532**	1	,670**	,420**	,135	,237*	,323**	,525**	,695**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,269	,050	,007	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KSA3	Pearson Correlation	,714**	,670**	1	,504**	,199	,366**	,284*	,520**	,762**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,102	,002	,018	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KSA4	Pearson Correlation	,407**	,420**	,504**	1	,376**	,517**	,452**	,659**	,779**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,001	,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KSA5	Pearson Correlation	,163	,135	,199	,376**	1	,363**	,283*	,392**	,543**
	Sig. (2-tailed)	,180	,269	,102	,001		,002	,019	,001	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KSA6	Pearson Correlation	,304*	,237*	,366**	,517**	,363**	1	,420**	,468**	,663**
	Sig. (2-tailed)	,011	,050	,002	,000	,002		,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KSA7	Pearson Correlation	,274*	,323**	,284*	,452**	,283*	,420**	1	,398**	,617**
	Sig. (2-tailed)	,023	,007	,018	,000	,019	,000		,001	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KSA8	Pearson Correlation	,396**	,525**	,520**	,659**	,392**	,468**	,398**	1	,792**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,001	,000	,001		,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
JUMLA H	Pearson Correlation	,679**	,695**	,762**	,779**	,543**	,663**	,617**	,792**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

6.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Correlations

		PPA1	PPA2	PPA3	PPA4	PPA5	PPA6	JUMLAH
PPA1	Pearson Correlation	1	,549**	,368**	,404**	,326**	,277*	,690**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,001	,006	,021	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
PPA2	Pearson Correlation	,549**	1	,568**	,497**	,443**	,386**	,798**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,001	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
PPA3	Pearson Correlation	,368**	,568**	1	,385**	,268*	,367**	,680**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,001	,026	,002	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
PPA4	Pearson Correlation	,404**	,497**	,385**	1	,528**	,565**	,790**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,001		,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
PPA5	Pearson Correlation	,326**	,443**	,268*	,528**	1	,438**	,689**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,026	,000		,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
PPA6	Pearson Correlation	,277*	,386**	,367**	,565**	,438**	1	,679**
	Sig. (2-tailed)	,021	,001	,002	,000	,000		,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
JUMLAH	Pearson Correlation	,690**	,798**	,680**	,790**	,689**	,679**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	69	69	69	69	69	69	69

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

6.3 Komitmen Organisasi

Correlations

		KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KO7	KO8	JUMLA H
KO1	Pearson Correlation	1	,543**	,488**	,232	,255*	,246*	,204	,312**	,574**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,055	,035	,042	,093	,009	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KO2	Pearson Correlation	,543**	1	,369**	,183	,286*	,149	,350**	,106	,536**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,132	,017	,220	,003	,386	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KO3	Pearson Correlation	,488**	,369**	1	,587**	,457**	,451**	,393**	,461**	,760**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002		,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KO4	Pearson Correlation	,232	,183	,587**	1	,344**	,577**	,644**	,510**	,760**
	Sig. (2-tailed)	,055	,132	,000		,004	,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KO5	Pearson Correlation	,255*	,286*	,457**	,344**	1	,550**	,253*	,327**	,632**
	Sig. (2-tailed)	,035	,017	,000	,004		,000	,036	,006	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KO6	Pearson Correlation	,246*	,149	,451**	,577**	,550**	1	,653**	,580**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,042	,220	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KO7	Pearson Correlation	,204	,350**	,393**	,644**	,253*	,653**	1	,449**	,748**
	Sig. (2-tailed)	,093	,003	,001	,000	,036	,000		,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
KO8	Pearson Correlation	,312**	,106	,461**	,510**	,327**	,580**	,449**	1	,672**
	Sig. (2-tailed)	,009	,386	,000	,000	,006	,000	,000		,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
JUMLA H	Pearson Correlation	,574**	,536**	,760**	,760**	,632**	,782**	,748**	,672**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

6.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Correlations

		AKIP1	AKIP2	AKIP3	AKIP4	AKIP5	AKIP6	AKIP7	JUMLA H
AKIP1	Pearson Correlation	1	,562**	,534**	,557**	,287*	,440**	,497**	,784**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,017	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
AKIP2	Pearson Correlation	,562**	1	,652**	,622**	,293*	,342**	,342**	,762**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,014	,004	,004	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
AKIP3	Pearson Correlation	,534**	,652**	1	,625**	,271*	,365**	,309**	,764**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,024	,002	,010	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
AKIP4	Pearson Correlation	,557**	,622**	,625**	1	,487**	,508**	,241*	,821**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,046	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
AKIP5	Pearson Correlation	,287*	,293*	,271*	,487**	1	,254*	,186	,544**
	Sig. (2-tailed)	,017	,014	,024	,000		,035	,125	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
AKIP6	Pearson Correlation	,440**	,342**	,365**	,508**	,254*	1	,555**	,690**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,002	,000	,035		,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
AKIP7	Pearson Correlation	,497**	,342**	,309**	,241*	,186	,555**	1	,618**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,010	,046	,125	,000		,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
JUMLA H	Pearson Correlation	,784**	,762**	,764**	,821**	,544**	,690**	,618**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	69	69	69	69	69	69	69	69

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 7

UJI RELIABILITAS DATA

7.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

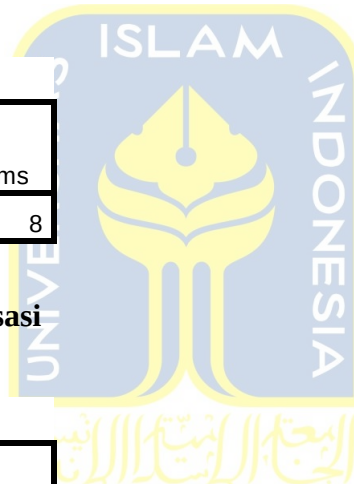
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,838	8

7.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,841	8



7.3 Komitmen Organisasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,841	7

7.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,815	6

LAMPIRAN 8

UJI NORMALITAS DATA

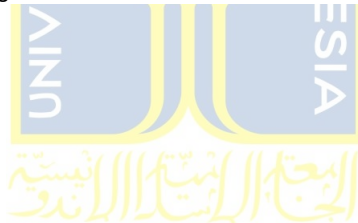
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,23651986
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,102
	Negative	-,095
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

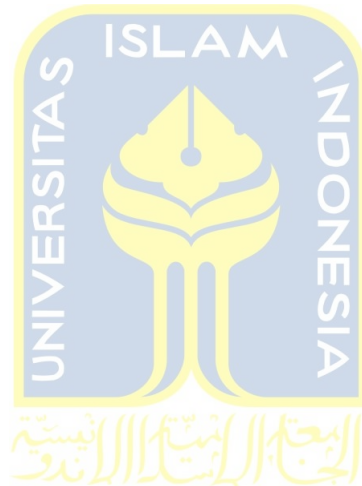
c. Lilliefors Significance Correction.



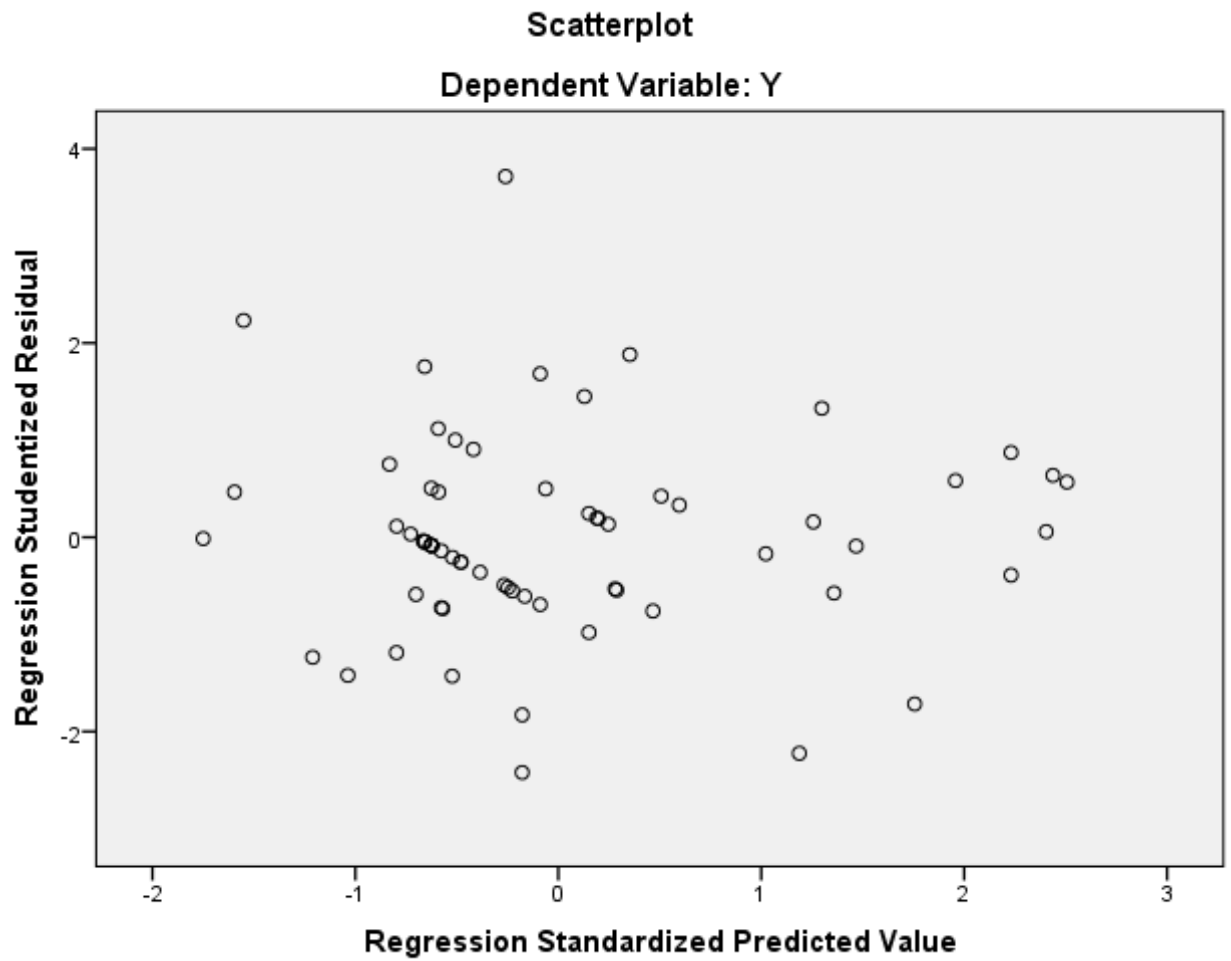
LAMPIRAN 9
UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,558	,294		1,896	,062		
X1	,188	,113	,186	1,668	,100	,531	1,882
X2	,626	,114	,613	5,506	,000	,531	1,882

a. Dependent Variable: Y



LAMPIRAN 10
UJI HETEROKEDASTISITAS



LAMPIRAN 11

UJI REGRESI LINIER BERGANDA

11.1 Persamaan 1

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,169	,327		3,577	,001
X1	,614	,099	,605	6,222	,000

a. Dependent Variable: Y



11.2 Persamaan 2

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,761	,272		2,802	,007
X2	,756	,084	,740	9,002	,000

a. Dependent Variable: Y

11.3 Persamaan 3

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,703	,329		2,140	,036
X1	-,236	,875	-,233	-,270	,788
X2	,941	,898	,921	1,048	,299
X1.Z	,145	,312	,789	,464	,644
X2.Z	-,122	,320	-,658	-,383	,703

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 12

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/399/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas Sosial DIY
2. Kepala Dinas Perhubungan DIY
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
4. Kepala Dinas Pariwisata DIY
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
8. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
10. Kepala Dinas Pertanian DIY
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Nomor : 013/DEK/10/Div.SDM/II/2019
Tanggal : 10 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : SILTA AGLISNEMA
NIM : 15312129
No.HP/identitas : 085290603905/3374134508970003
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial DIY, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Dinas Pertanian DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Waktu Penelitian : 15 Januari 2019 s.d 15 Juni 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601028-199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/399/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Sekretaris Daerah DIY
2. Inspektur DIY
3. Kepala BAPPEDA DIY
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY
5. Kepala Dinas Kebudayaan DIY
6. Kepala Dinas Kesehatan DIY
7. Kepala Dinas Sosial DIY
8. Kepala Dinas Perhubungan DIY
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
10. Kepala Dinas Pariwisata DIY

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Nomor : 013/DEK/10/Div.SDM/II/2019
Tanggal : 10 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : SILTA AGLISNEMA
NIM : 15312129
No.HP/Identitas : 085290603905/3374134508970003
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Sekretariat Daerah DIY, Inspektorat DIY, BAPPEDA DIY, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Dinas Pariwisata DIY
Waktu Penelitian : 15 Januari 2019 s.d 15 Juni 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.